



KABUPATEN LAMONGAN

INOVASI

SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu)

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

INOVASI DAERAH

INOVASI
SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan aktivitas pembangunan dan investasi di Kabupaten Lamongan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), meningkatnya jumlah objek pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, tingginya biaya operasional pengawasan lapangan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh objek pengawasan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengawasan lingkungan hidup yang konvensional juga menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan akurasi pengumpulan data. Proses pengumpulan data kepatuhan yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang lama dan berisiko terjadi kesalahan. Selain itu, monitoring kepatuhan belum dilakukan secara berkala dan terstruktur, sehingga potensi pelanggaran seringkali baru terdeteksi setelah terjadi dampak lingkungan yang signifikan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan mengembangkan SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu), yaitu sistem pengawasan lingkungan hidup yang mengintegrasikan seluruh proses pengawasan mulai dari perencanaan,

pengumpulan data, monitoring kepatuhan, analisis risiko, pelaksanaan pengawasan lapangan, tindak lanjut hasil pengawasan hingga pelaporan dalam satu sistem yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis teknologi informasi.

SIPADU berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penerapan sistem pengawasan lingkungan hidup berbasis digital, serta SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dengan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Inovasi ini juga mendukung program Lamongan Hijau sektor kegiatan/usaha.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Lingkungan Hidup

Tujuan ini berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan lingkungan hidup melalui:

- Digitalisasi seluruh proses pengawasan
- Pengawasan berbasis risiko dan prioritas
- Optimalisasi penggunaan sumber daya pengawasan
- Pemangkasan waktu dan biaya operasional pengawasan

2. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui:

- Monitoring kepatuhan secara berkala dan terstruktur
- Deteksi dini potensi pelanggaran
- Pembinaan dan pendampingan kepatuhan
- Penegakan hukum yang efektif dan proporsional

3. Mempercepat Proses Pengumpulan dan Verifikasi Data Pengawasan

Tujuan ini berupaya mempercepat proses pengumpulan dan verifikasi data pengawasan melalui:

- Pengumpulan data dan dokumen secara elektronik
- Sistem verifikasi yang terintegrasi
- Basis data pengawasan yang akurat dan terkini
- Pengurangan waktu administrasi

4. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data melalui:

- Basis data pengawasan yang komprehensif
- Dashboard monitoring dan analisis
- Informasi yang akurat dan real-time
- Dukungan penyusunan kebijakan berbasis bukti

5. Memperkuat Sinergi Pengawasan Lintas Sektor dan Lintas Kewenangan

Tujuan ini berupaya memperkuat sinergi pengawasan lintas sektor dan lintas kewenangan melalui:

- Pengawasan terpadu lintas instansi
- Koordinasi antar pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat
- Keterpaduan mekanisme pengawasan
- Peningkatan kolaborasi dan komunikasi antar instansi

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup

Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup melalui:

- Transparansi dan akuntabilitas pengawasan
- Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat
- Pelayanan yang lebih cepat dan profesional
- Peningkatan kepercayaan masyarakat

7. Mendukung Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tujuan ini mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui:

- Digitalisasi proses pengawasan
- Integrasi data dan sistem
- Transformasi digital pelayanan publik
- Penguatan tata kelola pemerintahan modern

C. MANFAAT

1. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup

- Pengawasan yang lebih terstruktur dan terarah
- Penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko

- Optimalisasi jangkauan pengawasan
- Peningkatan kualitas hasil pengawasan

2. Mempercepat Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepatuhan

- Pengumpulan data secara elektronik yang lebih cepat
- Verifikasi data yang lebih akurat
- Pengurangan waktu administrasi
- Peningkatan responsivitas pengawasan

3. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup

- Data yang akurat, terkini, dan terpercaya
- Informasi yang mudah diakses dan dipahami
- Basis data yang terintegrasi
- Dukungan pengambilan keputusan berbasis data

4. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Pengawasan

- Efisiensi penggunaan sumber daya manusia
- Pengurangan biaya operasional pengawasan
- Alokasi sumber daya berdasarkan prioritas risiko
- Peningkatan produktivitas pengawasan

5. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Terkait

- Pengawasan terpadu lintas instansi
- Koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur
- Pengurangan tumpang tindih kewenangan
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi

6. Mengurangi Potensi Pelanggaran Lingkungan Hidup

- Deteksi dini potensi pelanggaran
- Pembinaan dan pendampingan kepatuhan
- Penegakan hukum yang efektif
- Peningkatan kesadaran pelaku usaha

7. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah

- Transparansi proses pengawasan
- Akuntabilitas pelayanan
- Responsivitas terhadap pengaduan

- Pelayanan publik yang lebih baik

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi SIPADU hadir sebagai respons cepat terhadap kebutuhan pengawasan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan terintegrasi di Kabupaten Lamongan. Proses penciptaannya dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia dan koordinasi lintas sektor. Kecepatan penciptaan inovasi ini ditandai oleh beberapa aspek utama:

1. Identifikasi Masalah yang Cepat dan Relevan

Dinas Lingkungan Hidup dengan cepat mengidentifikasi bahwa pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), meningkatnya jumlah objek pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, tingginya biaya operasional pengawasan lapangan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Hal ini mendorong pencarian solusi sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

2. Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi yang Tersedia

SIPADU dikembangkan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang sudah tersedia:

- Website SILILA yang sudah berjalan sebagai basis integrasi
- Sistem database yang terintegrasi
- Perangkat dan jaringan yang mendukung
- Sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi

3. Kolaborasi Lintas Instansi dan Lintas Kewenangan

Inovasi ini dikembangkan melalui kolaborasi cepat dengan berbagai pemangku kepentingan:

- Pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat
- Perangkat daerah terkait
- Pelaku usaha dan/atau kegiatan
- Masyarakat dan pegiat lingkungan

4. Pendekatan yang Terstruktur dan Sistematis

SIPADU dikembangkan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis:

- Identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan
- Perumusan konsep inovasi
- Perancangan sistem dan pengembangan

- Uji coba dan penyempurnaan
- Implementasi dan evaluasi

5. Respons Cepat terhadap Kebutuhan Pengawasan

SIPADU dirancang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengawasan. Dashboard monitoring yang terintegrasi dengan website SILILA memungkinkan pemantauan kepatuhan secara berkala dan real-time.

Secara keseluruhan, SIPADU menunjukkan bahwa inovasi di bidang pengawasan lingkungan hidup tidak selalu memerlukan waktu lama atau biaya besar untuk diwujudkan. Dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi yang tepat, kolaborasi lintas instansi, dan pendekatan yang terstruktur, proses penciptaan inovasi dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu) memiliki sejumlah unsur kebaruan yang membedakannya dengan pola pengawasan konvensional. Kebaruan inovasi ini terletak pada integrasi seluruh proses pengawasan dalam satu sistem yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis teknologi informasi. Beberapa bentuk kebaruannya meliputi:

1. Pengawasan Terpadu Lintas Kewenangan

SIPADU mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta perangkat daerah terkait dalam satu mekanisme pengawasan yang terkoordinasi. Pendekatan ini menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

2. Pengawasan Berbasis Risiko

Objek pengawasan diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko lingkungan sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada kegiatan yang memiliki potensi dampak lebih besar. Pendekatan ini memastikan bahwa pengawasan dilaksanakan secara proporsional dan efektif.

3. Monitoring Kepatuhan Berbasis Sistem

Data kepatuhan dapat dipantau secara berkala melalui dashboard monitoring sehingga pengawas dapat mendeteksi potensi ketidaktaatan lebih cepat. Monitoring yang terstruktur dan sistematis meningkatkan responsivitas pengawasan.

4. Efisiensi Proses Pengawasan

Proses pengumpulan data dan dokumen dilakukan secara elektronik sehingga memangkas waktu administrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan lapangan. Digitalisasi proses pengawasan mengurangi beban administratif dan meningkatkan produktivitas.

5. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

SIPADU menyediakan basis data pengawasan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, pembinaan, maupun penegakan hukum lingkungan hidup. Data yang akurat dan terpercaya mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

6. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi

Indikator/Aspek	Sebelum Ada Inovasi (2021)	Sesudah Ada Inovasi (2025)
Pengumpulan Data Kepatuhan	Manual, membutuhkan waktu lama	Elektronik melalui sistem terintegrasi
Monitoring Kepatuhan	Belum tersedia sistem monitoring terpadu	Dashboard SIPADU terintegrasi SILILA
Prioritas Pengawasan	Umum, belum berbasis risiko	Berdasarkan tingkat risiko lingkungan
Koordinasi Pengawasan	Sektoral dan parsial	Terpadu lintas instansi dan lintas kewenangan
Efisiensi Pengawasan	Biaya dan waktu tinggi	Lebih efektif dan efisien melalui digitalisasi
Tingkat Kepatuhan	56,52%	65%

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu) dirancang sebagai upaya strategis untuk mengintegrasikan seluruh proses pengawasan lingkungan hidup dalam satu sistem yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis teknologi informasi. Inovasi ini menggabungkan berbagai fungsi dan modul dalam satu platform yang komprehensif. Desain SIPADU mencakup beberapa komponen utama:

1. Arsitektur Sistem

SIPADU dibangun dengan arsitektur yang mencakup:

- **Platform berbasis web:** Dapat diakses dari berbagai perangkat
- **Sistem database terpusat:** Menyimpan seluruh data pengawasan
- **Sistem keamanan dan otorisasi:** Mengatur hak akses pengguna

- **Dashboard monitoring:** Memantau kepatuhan secara real-time
- **Integrasi dengan website SILILA:** Sinergi data dan informasi

2. Modul Sistem

a. Modul Pendataan Objek Pengawasan:

- Pendataan dan pemutakhiran objek pengawasan
- Klasifikasi berdasarkan jenis dan risiko
- Informasi lengkap dan terkini

b. Modul Pengumpulan Dokumen Kepatuhan:

- Pengumpulan dokumen secara elektronik
- Verifikasi kelengkapan dan keabsahan
- Penyimpanan arsip digital

c. Modul Monitoring Kepatuhan:

- Monitoring kepatuhan secara berkala
- Dashboard visualisasi data
- Deteksi dini potensi ketidaktaatan

d. Modul Analisis Risiko:

- Analisis risiko lingkungan
- Pemetaan prioritas pengawasan
- Penetapan jadwal pengawasan

e. Modul Pengawasan Lapangan:

- Perencanaan pengawasan berbasis risiko
- Pelaksanaan pengawasan terstruktur
- Dokumentasi hasil pengawasan

f. Modul Tindak Lanjut dan Pelaporan:

- Tindak lanjut hasil pengawasan
- Penegakan hukum administratif
- Pelaporan dan rekapitulasi

3. Fitur Utama

a. Dashboard Monitoring:

- Visualisasi data kepatuhan
- Grafik dan tren kepatuhan

- Informasi real-time

b. Sistem Pengawasan Terpadu:

- Keterpaduan lintas instansi
- Koordinasi pengawasan
- Pengurangan tumpang tindih kewenangan

c. Digitalisasi Proses:

- Pengumpulan data elektronik
- Verifikasi online
- Dokumentasi digital

d. Basis Data Pengawasan:

- Data yang akurat dan terkini
- Akses mudah dan cepat
- Dukungan pengambilan keputusan

4. Alur Bisnis Proses

Tahap 1: Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pengawasan

- Identifikasi dan pendataan objek pengawasan
- Klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat risiko
- Pemutakhiran data secara berkala

Tahap 2: Pengumpulan Dokumen Kepatuhan Secara Elektronik

- Pelaku usaha mengunggah dokumen kepatuhan
- Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
- Penyimpanan arsip digital

Tahap 3: Monitoring Kepatuhan Lingkungan Secara Berkala

- Pemantauan melalui dashboard SIPADU
- Identifikasi potensi ketidaktaatan
- Tindakan preventif dan korektif

Tahap 4: Analisis Risiko dan Pemetaan Prioritas Pengawasan

- Analisis risiko lingkungan
- Penetapan prioritas pengawasan
- Penyusunan jadwal pengawasan

Tahap 5: Pelaksanaan Pengawasan Lapangan Berbasis Risiko

- Pelaksanaan pengawasan pada objek prioritas
- Pencatatan dan dokumentasi hasil
- Identifikasi temuan dan rekomendasi

Tahap 6: Pengawasan Terpadu Lintas Instansi

- Koordinasi antar instansi
- Pelaksanaan pengawasan bersama
- Tindak lanjut terintegrasi

Tahap 7: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- Tindak lanjut temuan pengawasan
- Penegakan hukum administratif
- Pembinaan dan pendampingan

5. Dokumentasi dan Panduan

Untuk memastikan keberlanjutan operasional, SIPADU dilengkapi dengan:

- **Dokumen SOP SIPADU** dan diagram alir pelaksanaan pengawasan
- **Dashboard SIPADU** terintegrasi dengan Website SILILA
- **Dokumentasi** kegiatan pengawasan lapangan
- **Monitoring dan evaluasi** secara berkala

C. PROSES/TAHAPAN PENERAPAN INOVASI

Proses penerapan inovasi SIPADU dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, dimulai dari uji coba dan konsolidasi awal hingga implementasi terbuka dan pemantapan layanan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutan program.

Tahap 1: Uji Coba dan Konsolidasi Awal

Kegiatan:

1. Identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan sistem pengawasan
2. Perumusan konsep dan desain SIPADU
3. Penyusunan SOP dan diagram alir pelaksanaan pengawasan
4. Pengembangan sistem dan dashboard monitoring
5. Uji coba internal (alpha testing) dan perbaikan
6. Uji coba terbatas (beta testing) dengan pengguna terpilih

7. Evaluasi hasil uji coba dan perbaikan

Output:

- Konsep dan desain SIPADU final
- SOP dan diagram alir tersusun
- Dashboard monitoring terintegrasi dengan SILILA
- Hasil uji coba terdokumentasi

Tahap 2: Penguatan Sistem dan Penyiapan Operasional

Kegiatan:

1. Penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba
2. Finalisasi SOP dan diagram alir
3. Sosialisasi kepada perangkat daerah dan stakeholder
4. Pelatihan petugas pengawas (PPLH)
5. Persiapan basis data objek pengawasan
6. Penetapan prioritas pengawasan berdasarkan risiko
7. Penguatan koordinasi lintas instansi

Output:

- Sistem SIPADU siap operasional
- SOP final dan terdokumentasi
- Petugas terlatih dan siap
- Basis data objek pengawasan siap

Tahap 3: Implementasi Terbuka dan Pemantapan Layanan

Kegiatan:

1. Implementasi SIPADU secara penuh
2. Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup melalui SIPADU
3. Monitoring kepatuhan melalui dashboard secara berkala
4. Pengawasan terpadu lintas instansi
5. Evaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha
6. Tindak lanjut hasil pengawasan
7. Perbaikan dan pengembangan berkelanjutan

Output:

- SIPADU beroperasi secara penuh
- Pengawasan lingkungan hidup efektif dan efisien
- Tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat
- Data pengawasan terintegrasi dan akurat

D. PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

Proses inovasi yang dihasilkan dari SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu) dimulai dari identifikasi tantangan pengawasan lingkungan hidup yang masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Lamongan. Keterbatasan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), meningkatnya jumlah objek pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, tingginya biaya operasional pengawasan lapangan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi menjadi pendorong utama lahirnya inovasi ini.

Dinas Lingkungan Hidup kemudian menggagas sistem pengawasan yang mengintegrasikan seluruh proses pengawasan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, monitoring kepatuhan, analisis risiko, pelaksanaan pengawasan lapangan, tindak lanjut hasil pengawasan hingga pelaporan dalam satu sistem yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis teknologi informasi. Inovasi ini mengubah paradigma pengawasan dari yang bersifat parsial dan manual menjadi terpadu dan digital.

Melalui proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, serta perangkat daerah terkait, SIPADU dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan seperti pendataan objek pengawasan, pengumpulan dokumen kepatuhan elektronik, monitoring kepatuhan berbasis sistem, analisis risiko, dan dashboard monitoring yang terintegrasi dengan website SILILA. Dengan pendekatan ini, SIPADU mendorong terwujudnya pengawasan lingkungan hidup yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi permasalahan pengawasan, tetapi juga memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas lingkungan yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keberlanjutan inovasi dijaga melalui penyusunan SOP dan diagram alir, pelatihan petugas, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pengembangan sistem sesuai kebutuhan. Ke depan, SIPADU direncanakan menjadi fondasi pengawasan lingkungan hidup

yang terintegrasi di Kabupaten Lamongan, sehingga manfaat yang diberikan dapat semakin luas dirasakan, khususnya dalam peningkatan kepatuhan pelaku usaha, efisiensi pengawasan, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

BAB III

PENUTUP

Inovasi SIPADU (Sistem Pengawasan Terpadu) merupakan terobosan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan. Melalui pemanfaatan sistem berbasis web yang terintegrasi, Dinas Lingkungan Hidup telah berhasil mengubah paradigma pengawasan dari yang bersifat parsial dan manual menjadi terpadu dan digital. Inovasi ini mendorong terciptanya pengawasan lingkungan hidup yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan pendekatan yang terstruktur namun berdampak besar, SIPADU telah membuka peluang baru dalam pengawasan lingkungan hidup yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengawasan. Harapannya, inovasi ini dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi oleh daerah lain, serta terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pengawasan lingkungan hidup ke depan. SIPADU bukan hanya sekadar sistem informasi, tetapi juga wujud nyata dari komitmen untuk menciptakan pengawasan lingkungan yang kreatif, adaptif, dan berpihak pada kelestarian lingkungan.

Keberhasilan implementasi SIPADU juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, jajaran dinas, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga pelaku usaha dan masyarakat yang turut memberikan masukan dan apresiasi. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan inovasi serta memastikan bahwa sistem yang disajikan tetap relevan dan kontekstual dengan kebutuhan pengawasan lingkungan hidup.

Di samping itu, inovasi ini mampu menumbuhkan semangat seluruh aparatur pengawas lingkungan untuk terus belajar dan berinovasi, menjadikan teknologi sebagai sahabat dalam menciptakan pengawasan lingkungan yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, SIPADU diharapkan mampu menjadi bagian dari transformasi pengawasan lingkungan hidup yang lebih modern, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Lamongan. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dari 56,52% menjadi 65%, efisiensi durasi pengawasan dari 7-9 hari menjadi 3-4 hari, serta pengawasan terpadu lintas instansi menjadi bukti nyata keberhasilan inovasi ini dalam meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan.



KABUPATEN LAMONGAN